

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

PENDAHULUAN

Saat ini, salah satu isu utama yang menjadi perhatian global dan Indonesia adalah isu dampak perubahan iklim terhadap stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sistem keuangan. Perhatian yang besar dari Indonesia terkait dampak perubahan iklim ditunjukkan melalui komitmen Indonesia dengan turut andil dalam meratifikasi berbagai inisiatif agenda perubahan iklim di internasional. Sektor keuangan menjadi ujung tombak dalam bentuk perwujudan pembangunan berkelanjutan yang menjadi stimulus pemberian pembiayaan pada kegiatan perekonomian. Dengan demikian, isu keuangan berkelanjutan berhubungan erat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber pembiayaan yang dapat mendukung upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim (*sustainable finance*), termasuk menangani risiko transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut memiliki tujuan akhir untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penguatan UMKM menjadi penting. Terkait dengan UMKM, berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian usaha mikro menghadapi permasalahan dan kendala dalam mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan. Berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, sekitar 44 juta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih belum memiliki akses pada perbankan (Ika, 2018). Masih banyaknya UMKM yang kesulitan dalam mengakses modal dari lembaga keuangan formal dikarenakan persyaratan-persyaratan pengajuan peminjaman yang belum dapat dipenuhi. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, dimana 74% UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.

Dalam memproduksi produk/layanan hijau, pelaku usaha akan membutuhkan investasi yang sangat besar guna mengintroduksi inovasi dan teknologi baru yang lebih hijau, termasuk pula pergeseran penggunaan energi hijau di dalamnya. Sementara itu, UMKM memiliki kendala klasik terkait dengan keterbatasan modal dan akses terhadap pembiayaan. Level pada *product life cycle*



Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

belum matang menjadikan harga produk cenderung juga belum kompetitif UMKM membutuhkan fasilitasi untuk meningkatkan akses pembiayaan (Bank Indonesia 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, dirumusan beberapa tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian diantaranya:

1. *Benchmarking* mengenai dukungan peningkatan kapasitas dan model pembiayaan mikro hijau bagi UMKM yang menerapkan praktek ramah lingkungan di negara lain.
2. Mengidentifikasi model pembiayaan mikro eksisting oleh UMKM Hijau yang berkembang di Indonesia.
3. Menganalisis tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia saat ini dan bagaimana cara mengatasinya dalam rangka meningkatkan dampak dan jangkauannya.
4. Menganalisis akses keuangan oleh UMKM Hijau serta faktor utama dalam penerapannya.
5. Menganalisis dampak pembiayaan keuangan mikro terhadap UMKM Hijau di Indonesia dan kontribusinya terhadap kesejahteraan.
6. Menganalisis peran lembaga keuangan dalam mempromosikan keuangan mikro hijau di Indonesia dan praktik/ skema terbaik dalam mendukung pengembangannya.
7. Menganalisis dukungan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan keuangan mikro hijau dan langkah kebijakan yang paling efektif untuk mempromosikannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkombinasikan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis kualitatif meliputi studi literatur dan deskriptif kualitatif dengan tabulasi silang. Sementara itu, metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah model ekonometrika dengan analisis regresi. Selain data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner dengan pemilihan sampel dilakukan secara *snowball* mengingat tidak tersedianya data mengenai UMKM hijau yang telah mengakses pembiayaan mikro. Metode ini merupakan metode pengambilan

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

sampel yang diterapkan ketika responden sulit dilacak. UMKM hijau yang memperoleh pendanaan mikro (terutama kategori hijau) merupakan responden yang sulit dilacak sehingga dengan menggunakan teori bola salju yang dimulai dari para *informan kunci* maka akan dilacak responden yang representative/tepat.

Selain metode survei, *indepth interview* dan rangkaian FGD juga dilakukan dengan narasumber ahli dari perbankan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdasarkan penelusuran dan penggalian informasi, maka dilakukan FGD dengan perusahaan-perusahaan melakukan CSR (*Corporate Social Responsibility*) terutama CSR untuk UMKM yang mentransisikan bisnisnya ke ramah lingkungan dan ekonomi sirkular diantaranya PT PLN, PT Antam, PT Adaro. Sementara itu BRI merupakan pengelola Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) juga menjadi narasumber kunci (*key expert*) terkait perannya dalam menyalurkan kredit ke UMK.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berbagai negara telah memberikan dukungan peningkatan kapasitas UMKM melalui skema-skema pembiayaan mikro khususnya bagi UMKM yang menerapkan prinsip ramah lingkungan.
 - a. Dukungan yang diberikan meliputi skema pembiayaan *soft loans* (pinjaman berbunga rendah), pemberian jaminan seperti *loan individual guarantee*, *loan portfolio guarantee*, *equity guarantee*, dan *bank fundraising guarantee*, pemberian hibah, relaksasi dan insentif pajak, hingga dukungan kelembagaan seperti membentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap pembiayaan bagi UMKM hijau.
 - b. Institusi keuangan publik, pasar utang, investasi sosial serta *financial technology* merupakan modal penting yang juga perlu diperhatikan guna meningkatkan akses keuangan bagi UMKM hijau.

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

2. Kondisi eksisting menunjukkan model bisnis pembiayaan mikro adalah sebagai berikut.
 - a. Kondisi UMKM yang kebanyakan *unbankable*. Pada kondisi UMKM yang *unbankable*, produk pembiayaan tidak mengharuskan jaminan dan persyaratan legalitas usaha.
 - b. Sumber pembiayaan Lembaga Keuangan yaitu KUR dan non-KUR yaitu kredit modal kerja dan investasi.
 - c. Sumber pembiayaan di luar Lembaga Keuangan yang banyak diakses oleh UMKM adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR), pendanaan philanthropy (zakat produktif dan wakaf), Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), dan kredit program dari pemerintah.
 - d. Saat ini, tambahan pembiayaan bagi UMKM hijau selain Lembaga Keuangan adalah CSR (BUMN dan swasta), PKBL (per tahun 2023 dialihkan ke perbankan melalui program PUMK), PSBI, fasilitasi dari Kementerian/Lembaga untuk program tertentu.

3. Tantangan pengembangan keuangan mikro hijau di Indonesia dari studi literatur, dapat dirangkum sebagai *external credit rationing* sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan mikro hijau,
 - b. Ketidakpastian teknologi, pasar dan peraturan yang ketat,
 - c. Kurangnya identifikasi terhadap risiko sosial dan lingkungan serta kurangnya kapasitas pada institusi keuangan,
 - d. Kurangnya insentif dari pemerintah terhadap proyek ramah lingkungan,
 - e. Proyek ramah lingkungan biasanya memakan waktu yang cukup panjang sementara fasilitasi pembiayaan biasanya diberikan dalam jangka waktu yang lebih pendek sehingga adanya ketidaksesuaian tempo pembiayaan,
 - f. Usaha atau proyek yang ramah lingkungan masih terbatas dan seringkali ramah lingkungan hanya sebagian kecil dari proses bisnis dan usaha sehingga realisasi pembiayaan pun akan tidak maksimal,
 - g. Masih kurangnya kapasitas sektor perbankan dalam mendukung usaha atau bisnis yang ramah lingkungan karena masih belum populernya isu ramah lingkungan dan

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

atau ekonomi hijau di kalangan masyarakat secara umum, dan

- h. Ekosistem *green finance* yang masih tergolong pada tahap pengembangan sehingga sistem pendukungnya seperti regulasi, kerangka kerja dan standarisasi untuk produk *green* juga belum siap.

Sementara itu, dari hasil survei dapat dirangkum sebagai tantangan internal (*internal credit rationing*) UMKM. Berikut tantangan yang dihadapi UMKM berdasarkan yang paling tinggi:

- a. Suku bunga tinggi,
 - b. Proses peminjaman dan birokrasi yang lama,
 - c. Ketersediaan jaminan,
 - d. Jangka waktu pengembalian pinjaman yang pendek
 - e. Tidak lolos sliK OJK
 - f. Produk pembiayaan tidak sesuai (misalnya tidak ada pembiayaan syariah)
 - g. Persyaratan Tabungan di muka
4. Beberapa temuan terkait dengan akses keuangan UMKM Hijau terkait dengan pembiayaan mikro adalah sebagai berikut:
- a. Identifikasi akses keuangan UMKM hijau menunjukkan bahwa pada UMKM yang mendapatkan kredit, sebagian besar mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon Rp 500 juta.
 - b. Faktor yang berpengaruh terhadap akses kredit adalah pendidikan pemilik UMKM, omzet usaha, dan area pemasaran produk. Semakin tinggi Pendidikan UMKM dan omzet usahanya, semakin besar pembiayaan yang diperoleh.
 - c. Tingkat pendidikan pemilik UMKM umumnya sejalan dengan tingkat literasi keuangan terkait produk pembiayaan yang bisa diakses untuk mengembangkan usahanya.
 - d. Omzet usaha UMKM dan area pemasaran produk berhubungan dengan kemampuan UMKM dalam pengembalian kredit. Semakin besar omzet usaha dan luas pemasaran, UMKM akan meningkatkan kredit yang diperoleh. UMKM dengan omzet besar dan berorientasi pasar ekspor akan memiliki likuiditas keuangan yang baik sehingga memiliki kemampuan pengembalian kredit yang baik.

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

5. Akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM.
 - a. Persepsi adanya peningkatan kesejahteraan ditinjau dari indikator peningkatan dalam kapasitas produksi, produktivitas, tenaga kerja, pendapatan, laba, variasi produk, aset, adopsi teknologi, investasi hijau, inovasi produk, dan praktik ramah lingkungan.
 - b. Penilaian oleh pemilik UMKM menunjukkan bahwa terdapat asosiasi positif antara persepsi terkait manfaat kredit dengan besarnya kredit yang diperoleh.
 - c. Persepsi positif terkait manfaat kredit lebih tinggi ditemui pada UMKM yang mendapatkan kredit lebih besar dibandingkan dengan UMKM yang mendapatkan kredit lebih rendah.
 - d. Hal tersebut menunjukkan semakin besar kredit yang bisa diakses dapat lebih mendukung peningkatan kapasitas produksi, adopsi teknologi dan praktek ramah lingkungan.
6. Pembiayaan UMKM hijau dari perbankan terus meningkat seiring komitmen mendukung pembiayaan berkelanjutan. Skema penyaluran kredit berupa kredit program (KUR) dan kredit komersial baik kredit modal kerja maupun investasi. Saat ini, belum tersedia insentif tambahan untuk **UMKM hijau secara khusus** seperti subsidi bunga tambahan. Kondisi eksisting menunjukkan insentif pembiayaan pemerintah untuk UMKM hijau masuk dalam skema UMKM secara umum seperti KUR, KUR Pertanian dan KUR Alsintan. Sementara itu, kebijakan UMKM hijau terutama sektor pertanian pada tahun tahun 2024 dialokasikan dukungan terhadap ketersediaan pupuk organik. Untuk pembiayaan hijau pemerintah telah membentuk BPD LH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) yang merupakan BLU Kementerian Keuangan untuk fokus pada *green finance*.
7. Otoritas moneter telah mengembangkan beberapa kebijakan macroprudential mendukung pembiayaan hijau namun belum fokus pada pengembangan UMKM hijau. Kebijakan *macroprudential green loan to value (LTV)/finance to value (FTV)* masih terbatas pada pembiayaan properti berwenang lingkungan dan kendaraan listrik.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

1. Komitmen perbankan dalam menyalurkan pembiayaan mikro hijau perlu didukung oleh insentif kebijakan. Saat ini, kebijakan makroprudential green loan to value (LTV)/finance to value (FTV) masih terbatas pada pembiayaan properti berwawasan lingkungan dan kendaraan listrik. Efektivitas pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) maksimal 1,5 % per 1 April 2023 terhadap peningkatan pembiayaan hijau UMKM perlu mendapat perhatian dan apresiasi.
2. Pengembangan skema pembiayaan mikro hijau perlu memperhatikan tahapan dan tingkat usaha UMKM hijau. Mengacu pada studi BI dan ITAPS FEM IPB (2022 dan 2023) yang mengklasifikasikan bisnis UMKM hijau menjadi Eco-Adopter, Eco-Entrepreneur dan Eco-Innovator.
 - a. UMKM pra Eco-Adopter dan Eco-Adopter yang baru mengembangkan usahanya dapat dihubungkan dengan pendanaan CSR (BUMN dan swasta) dan dana philanthropy (zakat dan waqaf produktif, dan lainnya), Program Kemitraan Bina Lingkungan, dan program pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan oleh non-Lembaga keuangan seperti program CSR perusahaan lebih diarahkan kepada aspek lingkungan yang dapat dikaitkan dengan bisnis utama atau dikaitkan dengan *supply chain* perusahaan sehingga tercipta nilai bersama (CSV).
 - b. UMKM Eco- Entrepreneur dapat dihubungkan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pendampingan pengembangan usaha.
 - c. UMKM Eco-Innovator dapat didukung untuk naik kelas sehingga dapat mengakses pembiayaan komersial.
3. Sejalan dengan komitmen peningkatan *supply* pembiayaan hijau dari perbankan maka berbagai kebijakan diarahkan untuk
 - a. Meningkatkan *demand* pembiayaan dari debitur UMKM hijau.
 - b. Transformasi UMKM hijau perlu didukung insentif tambahan seperti insentif subsidi sertifikasi dan peningkatan transformasi energi untuk UMKM hijau.
 - c. Supply kredit hijau dari perbankan dipengaruhi permintaan dari debitur UMKM hijau. Oleh karena itu, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, otoritas

Kajian Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Mikro Kepada Sektor Hijau untuk Meningkatkan Inklusifitas Keuangan

moneter, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi diperlukan untuk peningkatan literasi keuangan dan pendampingan akses pembiayaan maupun dukungan untuk transformasi dan peningkatan kapasitas UMKM hijau.

Tim Kajian IPB:

Widyastutik, Lukytawati Anggraeni, Farida Ratna Dewi,
Sri Retno Wahyu Nugraheni, Fahmi Salam Ahmad, Siti
Riska Ulfah Hidayanti, Wildan Nur Arrasyid

Tim Kajian PKSK:

Dudi Rulliadi, Martini Hasni, Berry Sugarman, Ami
Muslich, Erlangga Gilang Pradana, Widath Chaerunissa
Ayuningtyas